

REFORMASI KULTURAL POLRI PADA BIDANG OPERASIONAL GUNA MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DALAM RANGKA MENGHADAPI PEMILU 2009

1. PENDAHULUAN

Sistem Ketatanegaraan kita terdapat perubahan yang mendasar sejak tahun 2004 yang ditandai dengan perubahan tugas MPR, perubahan tugas tersebut yaitu Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Pemilihan langsung oleh rakyat merupakan wujud demokrasi dan implementasinya dalam manajemen pemerintahan yang di mulai dari sistem perencanaan. Pemilihan langsung ini juga merupakan wujud pemerintahan oleh rakyat. Namun demikian dampak dari pemilihan secara langsung ini dapat menimbulkan *euphoria* yang berujung kerusuhan dan gangguan keamanan lainnya.

Oleh karena itu sejalan dengan tugas Polri sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dalam negeri, harus mampu menciptakan iklim keamanan yang kondusif menjelang, selama dan pasca Pemilu 2009, guna mendukung pelaksanaan pemilu yang

* Penulis adalah KBG Bin OPS Polda Banten

aman dan lancar. Belajar dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu 1999 yang berdampak kerusuhan di beberapa daerah dan penyelenggaraan Pemilu 2004 yang relatif kondusif, Polri harus mampu mereformasi penyelenggaraan operasionalnya baik dalam kegiatan rutin kepolisian, operasi kepolisian dan kerja sama kepolisian. Sehingga pelaksanaan pengamanan penyelenggaraan Pemilu 2009 tidak hanya bertumpu pada operasi kepolisian yang fokus dilaksanakan menjelang Pemilu, tetapi jauh sebelumnya sudah di gelar kegiatan-kegiatan rutin kepolisian yang selektif berdasarkan prediksi intelijen dan kakerda wilayah masing-masing. Kultur penyelenggaraan operasional Polri yang selama ini terkesan sebagai pemadam kebakaran, kurang didukung kuat oleh prediksi intelijen dan perencanaan yang kurang matang (operasi-operasi kepolisian), harus direformasi melalui strategi yang mengutamakan kegiatan rutin yang targeter sepanjang tahun yang lebih selektif dan fokus dengan sasaran yang komprehensif saling mendukung antar fungsi-fungsi kepolisian.

2. ULASAN PENGALAMAN

Penulis selama kurun waktu 15 (lima belas) tahun melaksanakan dinas kepolisian, lebih banyak pada bidang operasional/lapangan khususnya fungsi Intelijen, Kapolsek dan Wakapolres. Setelah lulus PTIK tahun 2003 (angkatan 38), penulis ditempatkan di Polda Jateng dengan jabatan Kasubbag Intelkam Polwil Surakarta kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian menjadi Wakapolres Sragen Polwil Surakarta kurang lebih 2 tahun. Penulis diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan Sespimpol tahun 2007 angkatan 44 yang kemudian ditempatkan di Polda Banten sebagai Kabag Bin Ops Biro Operasi.

Berbekal pengalaman dinas kepolisian selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun tersebut, penulis sangat merasakan bahwa

operasional Polri yang terselenggara selama ini masih terkesan belum pro aktif, belum terencana secara bottom up, manajemen hanya terfokus pada pelaksanaan (mengacu pada siklus manajemen Ren -Or - lak - Dal) dan mengutamakan hasil pelaksanaan yang sifatnya terukur, mudah dipublikasikan serta tidak berorientasi pada “out come” yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai *stake holder* Polri.

Kultur penyelenggaraan operasional tersebut tercermin pada penggelaran operasi-operasi kepolisian yang lebih mendapat atensi pimpinan Polri hingga tingkat kewilayahan dibanding kegiatan-kegiatan rutin kepolisian yang lebih bersifat awal dalam mengantisipasi embrio-embrio kejahatan atau gangguan kamtibmas lainnya.

Dalam hal mengejar popularitas dan publisitas, penyelenggaraan operasi kepolisian yang lebih berfokus pada pengungkapan kasus lebih ditonjolkan dan didukung anggaran yang lebih dibandingkan dengan kegiatan rutin kepolisian yang digelar sepanjang tahun dalam rangka mengantisipasi gangguan kamtibmas berdasarkan prediksi intelijen dan kalender kamtibmas.

Hal ini nampak pada pola-pola pengamanan khususnya event-event nasional seperti pengamanan Pemilu 2009 yang lebih fokus pada penyelenggaraan operasi kepolisiannya dibandingkan kegiatan rutin kepolisian yang lebih awal dalam rangka mendeteksi embrio-embrio gangguan yang mungkin muncul pada penyelenggaraan Pemilu 2009 nanti.

Oleh karena itu kultur penyelenggaraan operasional Polri yang terkesan sebagai “pemadam kebakaran” tersebut harus direformasi agar ke depan Polri mampu menangkal dan mencegah embrio-embrio gangguan kamtibmas tidak berkembang dan muncul sebagai gangguan nyata yang dapat mengganggu aktifitas masyarakat setiap harinya.

3. PEMBAHASAN TOPIK TULISAN

Hal-hal yang menjadi akar permasalahan perlunya reformasi kultural penyelenggaraan operasional Polri menurut penulis adalah sebagai berikut:

- Sasaran Operasional Polri belum menyentuh kepada hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas (*symptom-symptom/embrio* gangguan kamtibmas).
- Penyelenggaraan Operasional Polri lebih dominan pada operasi kepolisian dengan pola penegakan hukum atau penindakan (hasil mudah diukur dan lebih populis/mudah dipublikasikan).
- Penyelenggaraan Operasional Polri belum integratif baik eksternal maupun internal (belum memberdayakan secara optimal masyarakat sebagai *stake holder* dalam proses perencanaan penyelenggaraan kegiatan kepolisian yang bersifat rutin dengan “*out come*” dapat dirasakan masyarakat).
- *Reward* lebih ditujukan kepada hasil pelaksanaan operasional Polri yang mudah terukur/ungkap kasus, sehingga kurang mampu memotivasi penyelenggaraan operasional yang bersifat rutin dan sulit diukur prestasi/kinerjanya namun dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat (*out come*).
- Anggaran Operasional Polri belum mendukung semua tahapan proses Manajemen Operasional Polri (MOP) khususnya tahap perencanaan.

a. Kondisi Awal Penyelenggaraan Operasional Polri

- 1) Penyelenggaraan Operasional Polri masih didominasi oleh operasi kepolisian dalam rangka mengejar target operasi terhadap pengungkapan kasus dan penindakan terhadap Gangguan Nyata (GN) yang telah muncul terlebih dahulu.

- 2) Penyelenggaraan Operasional Polri belum didasarkan pada perencanaan yang akurat berdasarkan perkiraan intelijen, karakteristik kerawanan daerah dan kalender Kamtibmas masing-masing daerah, sehingga pelaksanaannya kurang terarah dan hasilnya belum maksimal.
- 3) Operasional Polri sering dilaksanakan setelah meningkatnya gangguan kamtibmas yang ditandai dengan anev gangguan kamtibmas yang meningkat secara signifikan, misalnya kasus pencurian yang naik secara tajam, oleh karena itu penangkalan maupun pencegahan agar tidak terjadi peningkatan gangguan kamtibmas tersebut kurang mendapat perhatian.
- 4) Operasional Polri seringkali kurang sinergis penyelenggaraannya dalam koordinasi antar fungsi operasional maupun pelibatan unsur-unsur eksternal, sehingga pola-pola kegiatannya seperti penangkalan Potensi Gangguan (PG), pencegahan terhadap Ambang Gangguan (AG) serta penindakan terhadap gangguan yang telah muncul sering tidak saling mendukung dan berkelanjutan.
- 5) Dukungan anggaran dalam penyelenggaraan operasional Polri belum mendukung semua tahapan proses manajerial terutama tahap perencanaan yang seringkali terabaikan untuk dukungan anggarannya, bagaimanapun juga keberhasilan penyelenggaraan operasional tersebut harus berjalan seimbang dan kontinyu mulai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

b. Harapan Penyelenggaraan Operasional Polri dalam Menghadapi Pemilu 2009

- 1) Penyelenggaraan operasional Polri harus dilaksanakan secara seimbang dan terukur mulai kegiatan rutin kepolisian, operasi

kepolisian dan kerja sama Kepolisian berdasarkan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika gangguan kamtibmas.

- 2) Menjelang pelaksanaan Pemilu 2009, penyelenggaraan operasional Polri lebih dititik beratkan terhadap penangkalan potensi gangguan agar tidak berkembang menjadi ambang gangguan dan berkembang menjadi gangguan nyata yang dapat menghambat kelancaran Pemilu 2009.
- 3) Kegiatan rutin Kepolisian dan kerja sama Kepolisian lebih ditingkatkan melalui pemberdayaan Polmas dengan melibatkan potensi masyarakat yang maksimal dalam pelaksanaannya.
- 4) Operasi Kepolisian lebih diutamakan dengan pola operasi Intelijen untuk mendeteksi gangguan Kamtibmas dilakukan melalui penggalangan serta operasi dengan pola pemeliharaan keamanan yang kegiatannya bersifat cegah dan tangkal, dengan penataan aspek-aspek kehidupan bermasyarakat, pembinaan dan bimmas agar masyarakat memiliki daya cegah dan daya lawan serta tidak mudah terpengaruh oleh provokasi dan ancaman.

c. Konsepsi Reformasi Kultural Penyelenggaraan Operasional Polri.

1) Strategi 1

Mengoptimalkan penyelenggaraan Operasional Polri dengan sasaran utama potensi gangguan kamtibmas sehingga tidak berkembang menjadi gangguan nyata yang dapat menghambat penyelenggaraan Pemilu 2009.

2) Strategi 2

Meningkatkan kegiatan rutin dan kerja sama kepolisian melalui pemberdayaan Polmas yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (*Law abiding citizen*).

3) Strategi 3

Penyelenggaraan operasional Polri dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan unsure-unsur eksternal sejak tahap perencanaan dan lintas fungsi secara *bottom up* (bertahap).

4) Strategi 4

Setiap langkah-langkah manajerial penyelenggaraan Operasional Polri didukung oleh anggaran yang mencukupi.

d. Upaya-Upaya dalam Menindaklanjuti Konsep Strategi

1) Upaya mewujudkan Strategi 1

a) *Environmental scanning* (perkembangan lingstra) terutama terhadap potensi gangguan yang dapat menghambat penyelenggaraan Pemilu 2009.

b) Pemetaan kerawanan daerah yang berpotensi terjadinya konflik sosial.

c) Sasaran operasional Polri diarahkan pada hasil *Environmental Scanning* terhadap perkembangan lingkungan strategis menjelang, selama dan setelah Pemilu 2009.

d) Kegiatan rutin Kepolisian selalu didasarkan kepada perencanaan yang disusun dengan mengakomodir kalender kamtibmas, perkiraan Intelijen, dinamika kegiatan masyarakat, sehingga dapat menangkal berkembangnya potensi gangguan guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat hingga penyelenggaraan Pemilu 2009 selesai.

e) Kegiatan rutin Kepolisian setiap hari yang merupakan wujud kinerja kedinasan anggota dan organisasi Polri setiap hari, ditujukan untuk meniadakan faktor pencetus gangguan kamtibmas melalui kegiatan koordinasi, kerja sama, bimbingan/penyuluhan, pengayoman kemitraan, pembinaan dan lain lain.

- f) Kegiatan rutin Kepolisian dilaksanakan untuk memantau/memonitor dan pengamanan seluruh kegiatan partai politik dan ormas-ormasnya, dalam rangka menggalang kekuatan massa menjelang Pemilu 2009.
- g) Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu damai, tertib dan aman mulai dilaksanakan melalui kegiatan rutin kepolisian oleh semua fungsi operasional sesuai bidang tugas masing masing.
- h) Kerja sama Kepolisian dengan instansi terkait yakni KPU, Pemerintah, partai politik peserta Pemilu, Komite pemantau Pemilu dan LSM independen pemantau Pemilu lainnya, dilaksanakan dengan membuat MoU hingga tingkat bawah untuk bersama sama meredam semua potensi kerawanan yang dapat mengganggu penyelenggaraan Pemilu 2009.
- i) Pelatihan bersama instansi terkait dan potensi masyarakat lainnya dalam rangka menanggulangi gangguan kamtibmas yang dapat menghambat penyelenggaraan Pemilu 2009, diwujudkan melalui kerja sama kepolisian yang sudah terencana sejak awal menjelang Pemilu 2009.
- j) Penyelenggaraan Operasi kepolisian dengan tujuan untuk merubah situasi yang sebelumnya dinilai tidak/kurang tertib, tidak aman (berdasarkan penilaian intelijen) menjadi situasi yang tertib dan aman melalui pola operasi intelijen, operasi pengamanan kegiatan masyarakat dan operasi pemeliharaan keamanan dengan sasaran utama potensi gangguan dan embrio kejahatan yang dikhawatirkan berkembang menjadi gangguan nyata sehingga dapat menghambat kelancaran Pemilu 2009.
- k) Operasi Kepolisian dilaksanakan dengan mengutamakan pencegahan dan penangkalan sejak awal setiap potensi

gangguan daripada penindakan setelah munculnya gangguan nyata yang sering diikuti oleh dampak-dampak sosial lainnya.

2) Upaya mewujudkan Strategi

- a) Pengembangan jaringan informasi hingga menyentuh masyarakat tingkat RT/RW melalui sistem target yang dibebankan kepada seluruh anggota Polri dan pengawasan yang melekat dalam pelaksanaannya.
- b) Membuat target hingga masuk tahap sosialisasi penyelenggaraan Pemilu oleh KPU seluruh Ketua RT/RW sudah tersentuh oleh anggota Polri dan menjadi jaringan informasi guna memonitor potensi gangguan yang dapat menghambat kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2009.
- c) Membangun kemitraan melalui pengembangan jaringan informasi oleh semua fungsi operasional sesuai bidang tugas masing-masing dengan penyampaian dan ajakan penyelenggaraan Pemilu damai, aman dan lancar.
- d) Khusus fungsi Intelijen hingga Bapulbaket tingkat Polsek meningkatkan pembangunan jaringan intelijen melalui teknik *insert agent* terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang terindikasi sering kontra terhadap kebijakan pemerintah dan kelompok massa yang berbasis partai politik besar.
- e) Kegiatan rutin kepolisian dilaksanakan secara kontinyu terhadap gangguan nyata yang sering meresahkan warga seperti penyakit masyarakat hingga tuntas untuk menghindari aksi main hakim sendiri oleh warga masyarakat.
- f) Kegiatan rutin Kepolisian tidak mentolerir seluruh aksi massa berupa ekstra yudisial, penghakiman massa dan

menindak semua pelakunya untuk menunjukkan bahwa hukum itu ada dan melatih masyarakat untuk patuh terhadap hukum (*law abiding citizen.*)

- g) Kegiatan rutin Kepolisian berupa pengaturan, penjagaan, pengamanan dan patroli dilaksanakan dengan semaksimal mungkin yang melibatkan potensi masyarakat secara proporsional untuk memberikan suri tauladan dan contoh bagi masyarakat patuh hukum.
- h) Kerja sama Kepolisian dilakukan secara intensif dengan instansi terkait, partai politik peserta Pemilu dan KPU untuk melatih seluruh Satgas Parpol agar menguasai perundang-undangan Pemilu sehingga nantinya dapat mengendalikan massa Parpol yang sering melanggar selama rangkaian pelaksanaan Pemilu.
- i) Memberdayakan seluruh FKPM yang ada untuk meningkatkan kegiatan Polmas dalam membantu memonitor perkembangan potensi gangguan serta membantu penyelesaian permasalahan perselisihan tingkat lokal terkait penyelenggaraan Pemilu hingga akar permasalahannya (*problem solving*).

3) Upaya mewujudkan strategi 3

- a) Seluruh penyelenggaraan Operasional Polri mulai dari kegiatan rutin kepolisian, Operasi Kepolisian dan kerja sama kepolisian tahun 2008 dan 2009 yang berhubungan dengan antisipasi penyelenggaraan Pemilu 2009 sudah harus tersusun perencanaannya paling lambat Desember 2007.
- b) Penyusunan penyelenggaraan operasional Polri tersebut berdasarkan perkiraan intelijen, kalender kamtibmas, kakerda dan kegiatan kegiatan menonjol masyarakat.

- c) Seluruh Satker Polri hingga tingkat KOD agar segera melakukan OHA (*Organizational Health Audit*) guna mengetahui kekurangan internal baik kekuatan personal, sarana prasarana, dukungan anggaran, kemampuan *substantive/teknis* anggota dalam menghadapi Pemilu 2009.
- d) Hingga awal tahun 2008 seluruh Satker Polri sampai tingkat KOD harus sudah selesai membenahi kekurangan-kekurangannya berdasarkan OHA yang telah dilaksanakan masing masing.
- e) Perencanaan operasional Polri hingga tingkat KOD khususnya dalam menghadapi Pemilu 2009 pada tahap awaa agar melibatkan instansi terkait, partai politik dan ormas-ormasnya, LSM, Toga, Tomas dan potensi masyarakat lainnya secara proporsional.
- f) Saran masukan dari pihak eksternal agar diakomodir secara proporsional dan menjadi bahan pertimbangan pada perencanaan operasional Polri terutama dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu 2009.
- g) Masing-masing Balcker hingga tingkat KOD dapat membuat sarana penyampaian informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilu 2009 seperti kotak pos, *police box*, telepon. *web site* atau *e-mail* dan sebagainya yang mudah diakses oleh masyarakat yang akan menyampaikan informasinya.
- h) Anggota Polri hingga tingkat pelaksana di lapangan secara berjenjang (*bottom up*) agar diakomodir masukan-masukannya dalam penyusunan perencanaan operasional Polri dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu 2009.

4) Upaya mewujudkan strategi

- a) Dalam penyusunan DIPA yang mendukung penyelenggaraan operasional Polri hingga tingkat KOD agar direncanakan dukungan anggaran terhadap semua tahapan langkah-langkah manajerial operasional Polri mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, sehingga pelaksanaan Manajemen Operasioanl Polri (MOP) dapat terselenggara secara optimal.
- b) Penyusunan DIPA harus benar-benar berdasarkan Rencana Kerja Satker yang telah disusun berdasarkan masukan-masukan seluruh pengemban fungsi operasional hingga tingkat pelaksana secara berjenjang, sehingga benar-benar dapat mendukung kebutuhan riil pelaksana di lapangan.
- c) Dalam penyusunan Rancana Karja Satker, sebagai dasar penyusunan DIPA agar dibuat angket untuk menampung saran masukan dari pengemban fungsi operasional dan pembinaan sampai tingkat pelaksana, berdasarkan pengalaman dan penguasaan karakteristik kerawanan daerah tiap anggota sesuai fungsi dan bidang masing-masing.

e. Rekomendasi

- 1) Sebelum penyelenggaraan operasional Polri hingga tingkat KOD, terlebih dahulu diadakan *survey* atau penelitian terhadap *out come* yang menjadi harapan *stake holder*; penelitian ini digunakan sebagai referensi dalam penyusuncm rencana kerja Satker hingga penyusunan DIPA dan pembuatan rencana kegiatan.
- 2) Penyelenggaraan operasional Polri dalam menghadapi Pemilu 2009 tidak hanya dimulai dengan kegiatan Pemilu

2009, akan tetapi telah diawal kegiatan rutin dan kerja sama Kepolisian yang terarah sebelum tahap sosialisasi oleh KPU.

- 3) Dukungan anggaran dalam penyelenggaraan operasional Polri khususnya operasi dalam menghadapi Pemilu 2009 diberikan pada semua tahapan proses manajemen operasionalnya, yakni mulai tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

